

Kebijakan Penyelenggaraan PTKIN di Indonesia: Analisis Kronologis

Fikatul Hikmah *¹
Zulfatmi ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

*e-mail: fikatulhikmah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia dengan pendekatan analisis kronologis. Fokus utama penelitian adalah menggali bagaimana kebijakan PTKIN berkembang sejak masa kemerdekaan hingga era Reformasi, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan tinggi agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka yang mengkaji berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan PTKIN mengalami perubahan signifikan, dimulai dari kebijakan sentralistik pada era Orde Baru yang memastikan keseragaman pendidikan, hingga pergeseran menuju otonomi dan desentralisasi pada era Reformasi yang memberikan fleksibilitas lebih bagi PTKIN untuk berinovasi. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Transformasi kebijakan ini berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam mengadaptasi perkembangan teknologi dan globalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kebijakan PTKIN serta rekomendasi untuk penguatan kebijakan yang mendukung pendidikan agama Islam yang lebih relevan dan berkualitas.

Kata Kunci: Kebijakan PTKIN, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Analisis Kronologis, Desentralisasi, Kualitas Pendidikan.

Abstract

This research aims to analyze the policy for implementing State Islamic Religious Higher Education (PTKIN) in Indonesia using a chronological analysis approach. The main focus of the research is to explore how the PTKIN policy developed from the independence period to the Reformation era, as well as its impact on the quality of Islamic higher education. The research method used is descriptive with a qualitative approach, through a literature study that examines various literature, policy documents and related regulations. The research results show that PTKIN implementation policies have undergone significant changes, starting from centralized policies in the New Order era which ensured educational uniformity, to a shift towards autonomy and decentralization in the Reformation era which provided more flexibility for PTKIN to innovate. This policy is also influenced by the social, political and economic conditions developing in Indonesia. This policy transformation contributes to improving the quality of Islamic religious education, although it still faces challenges in adapting to technological developments and globalization. It is hoped that this research will provide deeper insight into PTKIN policies as well as recommendations for strengthening policies that support more relevant and quality Islamic religious education.

Keywords: PTKIN Policy, Islamic Religious Higher Education, Chronological Analysis, Decentralization, Quality of Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan intelektual, keagamaan, dan sosial masyarakat. PTKIN berfungsi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai bidang ilmu agama Islam, tetapi juga siap berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemikiran kritis dan kemampuan dalam memahami perkembangan dunia (Yusup & Sobana, 2021). Dalam konteks ini, kebijakan penyelenggaraan PTKIN di Indonesia menjadi sangat strategis, terutama dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, relevan, dan berkualitas. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi struktur kurikulum dan manajemen perguruan tinggi, tetapi juga menentukan arah pengembangan pendidikan agama Islam di tanah air.

Sejak masa penjajahan hingga pasca-kemerdekaan, kebijakan penyelenggaraan PTKIN di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan

ekonomi di negara ini (Arifin, 2020). Perubahan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi kelembagaan hingga kurikulum pendidikan yang diterapkan di setiap institusi. Dalam analisis ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan penyelenggaraan PTKIN berkembang dari masa ke masa, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kualitas pendidikan dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan penyelenggaraan PTKIN telah mengalami transformasi yang sejalan dengan kebijakan nasional pendidikan. Pada masa Orde Baru, misalnya, kebijakan pengembangan pendidikan tinggi berbasis agama Islam lebih banyak dikelola secara sentralistik oleh pemerintah. Namun, pada masa Reformasi, setelah tahun 1998, kebijakan tersebut mulai membuka ruang bagi PTKIN untuk memiliki otonomi yang lebih luas, meskipun tetap berada dalam kontrol pemerintah (Arifin, 2016). Perubahan ini memunculkan berbagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan PTKIN.

Kebijakan penyelenggaraan PTKIN juga terkait erat dengan peran Kementerian Agama (Kemenag) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perguruan tinggi agama Islam negeri di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi PTKIN, Kemenag memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan strategis yang mengarah pada pengembangan kualitas pendidikan tinggi agama Islam (Sanusi & Fatah, 2022). Dalam hal ini, kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan PTKIN juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berbasis pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan PTKIN di Indonesia melalui pendekatan analisis kronologis. Penelitian ini akan menelaah perkembangan kebijakan PTKIN dari masa ke masa, serta dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas pendidikan tinggi agama Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan tentang kebijakan pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia dan bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh PTKIN. Di dalam perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, peran PTKIN sangat vital dalam menjaga keberagaman dan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum (Hefni, 2020). Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan dalam penyelenggaraan PTKIN perlu mengakomodasi kebutuhan pengembangan ilmu agama yang sejalan dengan tuntutan globalisasi, teknologi, dan tantangan zaman. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi terhadap penguatan kebijakan yang mendukung pendidikan agama Islam yang lebih berkualitas.

Melalui kajian analisis kronologis ini, penelitian ini akan mencoba melihat perkembangan kebijakan PTKIN, mulai dari kebijakan yang diambil pada era awal kemerdekaan Indonesia hingga kebijakan-kebijakan terbaru yang muncul pada era Reformasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia berkembang dalam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kronologis untuk menggali perkembangan kebijakan penyelenggaraan PTKIN di Indonesia (Pahleviannur et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut bertransformasi seiring waktu dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan tinggi agama Islam. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara kebijakan yang ditetapkan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di setiap periode sejarah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Darmalaksana, 2020). Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dokumen-dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PTKIN, serta buku-buku, artikel jurnal, dan laporan yang membahas mengenai sejarah perkembangan PTKIN di Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat

menyajikan analisis yang berbasis pada data historis yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami kebijakan penyelenggaraan PTKIN dari perspektif kronologis.

Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam setiap periode pemerintahan di Indonesia. Setiap kebijakan akan dianalisis dalam konteksnya, baik dari segi tujuan, implementasi, maupun dampaknya terhadap perkembangan PTKIN. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat perubahan yang terjadi pada kebijakan tersebut, apakah ada korelasi dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Data yang diperoleh dari sumber pustaka akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kronologis (Syamuroma, 2024). Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis perkembangan kebijakan PTKIN di Indonesia, sementara analisis kronologis akan membantu dalam mengidentifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut saling terkait dan berpengaruh satu sama lain dalam berbagai periode sejarah. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan penyelenggaraan PTKIN di Indonesia dan bagaimana kebijakan tersebut berkembang dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kebijakan PTKIN Sejak Era Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam (PTKIN) dimulai dengan tujuan untuk memperkuat sistem pendidikan Islam di Indonesia yang lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik (Waskito, 2023). Pada periode ini, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pengembangan kualitas pendidikan agama yang dapat melahirkan tenaga pendidik dan ulama yang kompeten, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan masyarakat Indonesia pasca-kemerdekaan. Kebijakan pemerintah pada saat itu cenderung terpusat, dengan fokus utama pada pemerataan akses pendidikan agama Islam di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah membentuk berbagai lembaga pendidikan tinggi yang meliputi Fakultas Tarbiyah di universitas negeri. Fakultas-fakultas ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya PTKIN yang memiliki mandat khusus untuk mengelola pendidikan agama Islam secara komprehensif.

Selain itu, pada masa ini, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan sistem pendidikan yang mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan pengajaran di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia (Riduwan & Mahmud, 2023). Perkembangan kebijakan pendidikan tinggi agama Islam di awal kemerdekaan ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pendidikan agama Islam di Indonesia, yang mengedepankan keberagaman dan pemahaman agama yang mendalam. Pembentukan lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan diri dalam konteks ilmu agama, sekaligus mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kebijakan-kebijakan tersebut terus berkembang, beradaptasi dengan kebutuhan zaman, dan mendorong terwujudnya PTKIN yang semakin terstruktur dengan baik hingga saat ini.

Secara keseluruhan, kebijakan penyelenggaraan PTKIN di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga saat ini berfokus pada pengembangan pendidikan agama Islam yang terstruktur dengan baik, dengan tujuan menciptakan tenaga pendidik dan ulama yang kompeten. Dalam prosesnya, pemerintah berusaha untuk menyebarkan akses pendidikan tinggi agama Islam ke seluruh penjuru Indonesia, memastikan bahwa pendidikan ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembentukan lembaga-lembaga pendidikan seperti Fakultas Tarbiyah yang kemudian berkembang menjadi PTKIN adalah

langkah awal yang krusial dalam menciptakan sistem pendidikan tinggi agama Islam yang berbasis pada pemerataan, kualitas, dan relevansi dengan perkembangan zaman.

Sentralisasi Kebijakan Pada Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966-1998), kebijakan penyelenggaraan PTKIN di Indonesia didominasi oleh pengelolaan yang terpusat dan sentralistik di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional yang lebih terstruktur dan terkendali. Dalam kerangka sentralisasi ini, pemberian izin operasional, pengawasan, dan pengelolaan PTKIN sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kemenag (Bariyah et al., 2024). Dengan pendekatan sentralistik tersebut, pemerintah bertujuan untuk menghindari fragmentasi dalam pendidikan tinggi agama Islam yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan di berbagai daerah. Kebijakan ini juga memastikan bahwa pendidikan agama Islam yang diajarkan di seluruh PTKIN di Indonesia sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menciptakan keseragaman dalam pengajaran dan kurikulum.

Namun, meskipun kebijakan sentralisasi ini memberikan kontrol yang kuat terhadap pendidikan tinggi agama Islam, ada keterbatasan dalam hal inovasi dan fleksibilitas pengelolaan pendidikan di masing-masing PTKIN. Sebagian besar PTKIN pada masa ini berfokus pada pendidikan agama Islam yang bersifat tradisional, dengan penekanan pada pengajaran ilmu agama dan tafsir yang lebih bersifat klasik, tanpa banyak adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada tingkat global (Rosidin, 2016). Hal ini menyebabkan sejumlah PTKIN cenderung tertinggal dalam merespons perubahan zaman, terutama dalam mengintegrasikan teknologi, metode pembelajaran modern, serta riset ilmiah dalam kurikulum mereka. Meski demikian, kebijakan ini tetap memberikan dasar yang kuat dalam memperkenalkan dan memfasilitasi pendidikan agama Islam sebagai bagian integral dari pendidikan nasional yang harus diakui keberadaannya di seluruh penjuru Indonesia.

Secara keseluruhan, kebijakan sentralisasi penyelenggaraan PTKIN pada era Orde Baru memberikan dampak positif dalam memastikan keseragaman kurikulum dan kualitas pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, pendekatan sentralistik ini juga menghadirkan tantangan dalam hal fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan global. Kebijakan ini lebih menekankan pada pengajaran tradisional agama Islam dan kurang membuka ruang bagi inovasi dalam proses pembelajaran. Sebagai hasilnya, beberapa PTKIN kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam hal integrasi teknologi dan riset ilmiah.

Transisi Menuju Otonomi dan Desentralisasi pada Era Reformasi

Setelah era Reformasi 1998, kebijakan penyelenggaraan PTKIN mengalami pergeseran signifikan menuju otonomi dan desentralisasi. Dalam konteks ini, kebijakan desentralisasi memberi PTKIN lebih banyak keleluasaan dalam mengelola berbagai aspek operasionalnya, termasuk kurikulum, manajemen, dan pengembangan akademik (Bolqiah, 2023). Sebelumnya, kebijakan yang sangat terpusat memberikan pengaruh besar terhadap keseragaman, namun dengan desentralisasi, PTKIN diberi kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang lebih beragam. Otonomi ini memungkinkan masing-masing PTKIN untuk berinovasi dalam berbagai bidang, terutama dalam mengadopsi teknologi dan metode pembelajaran yang lebih modern. Kemenag, meskipun tetap menjadi pengawas utama, lebih berfokus pada pengawasan dan penetapan standar umum, sementara PTKIN diberi kebebasan

untuk merumuskan strategi pengajaran yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan globalisasi.

Salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan dalam era ini adalah penekanan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem akreditasi yang lebih ketat. Dengan kebijakan ini, PTKIN tidak hanya harus memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh Kemenag, tetapi juga harus tunduk pada standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (Nata, 2022). Hal ini mendorong PTKIN untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran mereka agar dapat memenuhi kriteria yang semakin ketat. Desentralisasi ini juga membuka peluang bagi PTKIN untuk menggali potensi lokal serta meningkatkan kolaborasi internasional, sehingga perguruan tinggi agama Islam di Indonesia dapat lebih bersaing di kancah global. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menjadikan pendidikan tinggi agama Islam lebih relevan dengan tuntutan zaman dan tantangan global yang dihadapi oleh dunia pendidikan.

Secara keseluruhan, transisi menuju otonomi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan PTKIN setelah Reformasi 1998 memberi PTKIN lebih banyak kebebasan untuk mengelola berbagai aspek akademik dan operasional mereka. Dengan diberikannya ruang untuk berinovasi, PTKIN dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan menghadapi tantangan globalisasi. Pengenalan sistem akreditasi yang lebih ketat menjadi salah satu langkah untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan ini memungkinkan PTKIN berkembang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan di Daerah

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan PTKIN di Indonesia adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan antara PTKIN yang berada di pusat (seperti Jakarta) dengan PTKIN yang ada di daerah terpencil (Khoiriyah, 2021). PTKIN yang berada di luar kota besar seringkali menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek penting yang mendukung kualitas pendidikan, seperti fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas yang kurang memadai, kurangnya perangkat teknologi yang memadai, serta akses terbatas terhadap sumber belajar yang berkualitas menjadi hambatan utama bagi mahasiswa di daerah untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan yang ada di pusat. Selain itu, keterbatasan dalam perekrutan tenaga pengajar yang berkualitas juga menjadi masalah, karena banyak tenaga pendidik yang lebih memilih bekerja di kota besar dengan tawaran gaji dan fasilitas yang lebih menarik. Implikasi dari masalah ini adalah kesenjangan yang semakin lebar antara PTKIN di pusat dan di daerah dalam hal kualitas pengajaran dan capaian akademik.

Kebijakan sentralisasi yang lebih menekankan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah pusat sebelumnya juga berkontribusi terhadap tantangan dalam implementasi kebijakan di daerah (Setyaningsih, 2017). Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseragaman standar pendidikan, namun PTKIN di daerah seringkali kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi lokal mereka. Faktor geografis, seperti akses transportasi yang terbatas, serta faktor ekonomi yang membatasi kemampuan daerah untuk membangun infrastruktur yang memadai, membuat implementasi kebijakan pendidikan menjadi kurang efektif di daerah. Selain itu, faktor sosial, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi agama, juga turut memperburuk implementasi kebijakan ini. Hal ini menyebabkan meskipun kebijakan yang diterapkan cukup berhasil di pusat,

penerapannya di daerah mengalami berbagai hambatan yang membuat kesenjangan kualitas pendidikan semakin sulit untuk diatasi.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan PTKIN di daerah utamanya disebabkan oleh ketidakmerataan sumber daya dan fasilitas antara PTKIN di pusat dan daerah terpencil. Faktor geografis, ekonomi, dan sosial menjadi hambatan besar dalam melaksanakan kebijakan yang efektif di daerah. Meskipun kebijakan sentralisasi memberikan kontrol yang kuat di pusat, penerapannya di daerah membutuhkan penyesuaian yang lebih fleksibel agar dapat mengatasi keterbatasan yang ada dan menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah dan pusat.

Penguatan Kualitas Pendidikan Melalui Kurikulum dan Penelitian

Pada era pasca-Reformasi, pemerintah Indonesia berfokus pada penguatan kualitas pendidikan melalui perubahan kurikulum yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman (Riza, 2020). Salah satu langkah penting dalam kebijakan ini adalah mendorong PTKIN untuk tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurikulum mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang kuat, tetapi juga mampu bersaing di dunia global dengan keterampilan dan pemahaman yang lebih luas, terutama dalam bidang sains, teknologi, dan sosial. Kurikulum yang diperbarui ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi yang tidak hanya mencakup teori agama, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, PTKIN mulai mengadopsi kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti teknologi informasi, ekonomi, dan ilmu sosial, untuk menciptakan lulusan yang holistik dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, kebijakan penguatan kualitas pendidikan di PTKIN juga mencakup pengembangan program-program riset dan kajian ilmiah yang melibatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan global (Ghafar & Sartika, 2023). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing PTKIN di tingkat internasional dan mengembangkan kapasitas riset yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang keagamaan dan sosial. PTKIN mulai aktif dalam melakukan penelitian yang menghubungkan ilmu agama dengan masalah-masalah kontemporer di masyarakat, seperti isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penguatan pendidikan karakter juga menjadi bagian integral dari kebijakan ini, dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki etika dan moral yang baik. Pendidikan berbasis teknologi juga diperkenalkan untuk memperkaya metode pengajaran dan pembelajaran, memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk mengakses sumber daya pendidikan secara lebih luas dan efektif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk memastikan PTKIN mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Kebijakan pemerintah pada era pasca-Reformasi berfokus pada penguatan kualitas pendidikan di PTKIN melalui perubahan kurikulum yang lebih relevan dan pengembangan riset ilmiah yang melibatkan kolaborasi internasional (Wedi et al., 2020). Integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan karakter dalam kurikulum menjadi langkah penting untuk menciptakan lulusan yang adaptif dan kompeten. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan PTKIN, tetapi juga untuk memastikan bahwa PTKIN mampu bersaing di tingkat global dengan

mengembangkan kemampuan riset dan pemahaman ilmu agama yang lebih komprehensif

Dengan adanya perubahan kebijakan ini, PTKIN diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama Islam, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan tinggi agama Islam yang tidak hanya berbasis pada tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan global.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan PTKIN di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Perubahan kebijakan tersebut mencerminkan usaha pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan tinggi agama Islam dan memastikan bahwa PTKIN mampu menghadapi tantangan zaman. Meskipun terdapat banyak perubahan positif dalam kebijakan penyelenggaraan PTKIN, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakmerataan kualitas pendidikan dan pengelolaan yang kurang optimal di beberapa PTKIN.

Sebagai saran, penting bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan kebijakan yang mendukung pengembangan PTKIN dengan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem manajemen yang lebih efisien, dan memperkuat peran PTKIN dalam riset dan inovasi di bidang pendidikan agama Islam. Selain itu, PTKIN juga perlu diberikan kebebasan yang lebih besar dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga lulusan PTKIN dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. S. (2016). Kecenderungan Global Pendidikan Tinggi dan Pergeseran Paradigma Reformasi Pendidikan Tinggi pada Institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 135-154.
- Arifin, N. (2020). Kebijakan Transformasi IAIN Menjadi UIN Pada Kementrian Agama Republik Indonesia. *Disertasi (Tidak Dipublikasikan)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bariyah, O. N., Romlah, M. P., & Nurhadi, M. A. (2024). *Dinamika Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bolqiah, L. H. (2023). An Islam and the Capacity of the Democratic Regime in Indonesia in the Reformation Era. *POLIGOVs*, 1(1), 48-67.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ghafar, M., & Sartika, D. (2023). Analisis Transformasi IAIN Menjadi UIN Sebagai Upaya Meningkatkan Reputasi dan Posisi Global. *Ta'dib*, 13(2), 35-40.
- Hefni, W. (2020). Moderasi beragama dalam ruang digital: Studi pengarusutamaan moderasi beragama di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1-22.
- Khoiriyah, B. (2021). *Model Integrasi Keilmuan Pesantren pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Nata, H. A. (2022). *Membangun Pendidikan Islam Yang Unggul dan Bedraga Saing Tinggi: Seri Kajian: Analisis Kebijakan dan Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.

- Riduwan, R., & Mahmud, A. (2023). Integrasi Agama dan Sains dalam Sistem Pendidikan Model Kuttab. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 13(1), 85-104.
- Riza, M. (2020). Quo Vadis Lembaga Pendidikan Dayah Pasca Kemerdekaan Dan Pasca Reformasi. *Jurnal As-Salam*, 4(2), 284-300.
- Rosidin, R. (2016). Problematika Pendidikan Islam Perspektif Maqâsid Sharî'ah. *Marajijournal of Islamic Studies*, 3(1), 185-210.
- Sanusi, S., & Fatah, A. (2022). Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Paradigma Ilmu Islam Terapan di IAIN Kudus. In *ICIE: International Conference on Islamic Education* (Vol. 2, pp. 79-98).
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi tranformasi sistem sentralisasi-desentralisasi pendidikan dalam pembangunan masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76-94.
- Syamuroma, M. A., Hasmawati, F., & Yahya, A. H. (2024). Analisis Jurnalisme Investigasi Dalam Film Collective (2019). *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2(2), 332-340.
- Waskito, T. (2023). Institusionalisasi pemikiran pendidikan Mohammad Natsir ke dalam lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 285-303.
- Wedi, A., Zulhazmi, A. Z., & Anwar, M. Z. (2020). *Wacana Keagamaan di Indonesia Pasca Reformasi*. IAIN Surakarta Press.
- Yusup, D. K., & Sobana, D. H. (2021). Strategi Pengembangan Laboratorium Mini Bank Dan Klinik Bisnis Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/351495/strategi-pengembangan-laboratorium-mini-bank-dan-klinik-bisnis-pada-perguruan-ti>